

**ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 013 TAHUN 2020 PADA  
LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS X BERBASIS SYSTEM SYNCORE  
BLUD (BADAN LAYANAN UMUM DAERAH)**

**Laporan Magang**



**Disusun oleh:**

Elfa Nuriyana  
18212003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS & EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

**ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 013 TAHUN 2020 PADA  
LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS X BERBASIS SYSTEM SYNCORE  
BLUD (BADAN LAYANAN UMUM DAERAH)**

**Laporan Magang**

**Laporan Magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**ELFA NURIYANA**

**18212003**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS & EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 013 TAHUN 2020 PADA  
LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS X BERBASIS SYSTEM SYNCORE  
BLUD (BADAN LAYANAN UMUM DAERAH)**



**Disusun oleh:**

**Nama : Elfa Nuriyana**

**No.Mahasiswa : 18212003**

**Jurusan : Akuntansi**

**Telah disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing**



**(Tati, SE., M.Ak., Ak., CA)  
pada tanggal: 27 Juli 2021**

**Pembimbing Instansi**

**(Larasati Dwi Hastuti, SE)  
pada tanggal: 27 Juli 2021**

## **PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN**

### **PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN**

“ Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi/hukuman apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku. ”

Yogyakarta, 26 Juli 2021

Penulis



**Elfa Nuriyana**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat, Hidayah, dan juga Inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang di akhir semesternya dengan judul “**Analisis Penerapan PSAP Nomor 013 Tahun 2020 Pada Laporan Keuangan Puskesmas X Berbasis System Syncore BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)**” ini dengan baik. Tak lupa juga shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita semua ke dalam keadaan yang damai serta penuh cahaya seperti pada saat sekarang ini.

Penulis melakukan penyusunan laporan magang ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Diploma 3 Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis juga merasa bahwa selama melakukan penyusunan laporan magang ini mengalami beberapa hambatan dan kesulitan. Namun, penulis pun merasa bahwa laporan magang yang disusun ini masih jauh dari kata sempurna dan juga masih ada kekurangan yang lainnya.

Penyusunan laporan magang ini sangat diupayakan semaksimal mungkin oleh penulis dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang membantu dalam kelancaran proses penyusunannya. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis rahmat, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang sehingga penulis dapat menyusun laporan ini.

2. Almh.Mamah dan Bapak yang selalu memberikan doa, dukungan dan juga telah membiayai segala kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan di Diploma 3 Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Diri sendiri yang selalu berusaha untuk dapat bangkit dan kuat dalam menjalani hidup.
4. Ibu Marfuah, Dra., M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Diploma 3 Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Tatik, SE., M.Ak., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah memberikan arahan dan juga bimbingan selama penyusunan laporan magang ini.
6. PT. Syncore Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat magang disana serta menimba ilmu selama proses magang berlangsung.
7. Seluruh dosen Diploma 3 Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa studinya.
8. Shifa Fissilmi, Ramadinta Putriaswati, Nisa Isdyantanti, dan Sabiha Harun Mokoagow yang telah mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan laporan magang ini, serta juga telah memberikan dukungan dan doanya kepada penulis selama ini.
9. Dan juga seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hormat Saya,

Elfa Nuriyana

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I .....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang .....	3
1.3 Target Magang .....	4
1.4 Bidang Magang .....	4
1.5 Lokasi Magang.....	4
BAB II.....	6
2.1 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	6
2.1.1 Pengertian.....	6
2.1.2 Tujuan dan Asas Pengelolaan BLUD.....	7
2.2 Akuntansi Keuangan Pemerintahan.....	8
2.2.1 Pengertian.....	8

2.2.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan .....	8
2.2.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.....	10
2.2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan .....	10
2.3 Laporan Keuangan Daerah.....	16
2.3.1 Pengertian.....	16
2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah.....	17
2.3.3 Karakteristik Laporan Keuangan Daerah .....	18
2.3.4 Komponen Laporan Keuangan Daerah .....	20
2.3.5 Dasar Hukum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	24
2.4 Proses Penyusunan Laporan Keuangan .....	24
2.5 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah .....	26
<b>BAB III .....</b>	<b>28</b>
3.1 Data Umum .....	28
3.1.1 Gambaran Umum Puskesmas X.....	28
3.1.2 Tugas dan Fungsi Puskesmas X .....	28
3.2.3 Visi dan Misi Puskesmas X.....	29
3.1.4 Jenis Pelayanan di Puskesmas X .....	30
3.1.5 Susunan Pejabat Pengelola UPT BLUD Puskesmas X .....	32
3.2 Data Khusus .....	34
3.2.1 Profil Singkat PT Syncore Indonesia .....	34

3.2.2 Program Syncore Indonesia.....	35
3.2.3 Visi, Misi, dan Motto PT Syncore Indonesia .....	37
3.2.4 Struktur Organisasi Perusahaan.....	38
3.2.5 Aplikasi Syncore BLUD .....	38
3.2.6 Kelebihan dan Kekurangan dari Aplikasi Syncore BLUD.....	39
3.2.7 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan melalui Syncore BLUD .....	40
3.2.8 Penyajian Laporan Keuangan BLUD pada Puskesmas X.....	44
3.2.9 Analisis Penerapan PSAP Nomor 013 .....	58
<b>BAB IV .....</b>	<b>63</b>
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 2 Analisis PSAP 013

62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi PT Syncore Indonesia	5
Gambar 3. 1 Tampilan Log-in	41
Gambar 3. 2 Menu Utama	41
Gambar 3. 3 Sub-Menu dari Menu Akuntansi	42
Gambar 3. 4 Sub-Menu dari Menu Saldo Awal	42
Gambar 3. 5 Menu pada Bagian Aset/Kewajiban/Ekuitas	42
Gambar 3. 6 Sub-Menu pada Bagian Jurnal Umum	43
Gambar 3. 7 Menu Posting	43
Gambar 3. 8 Menu Utama	44
Gambar 3. 9 Sub-Menu Laporan Keuangan	44
Gambar 3. 10 Laporan Realisasi Anggaran UPTD Puskesmas X	46
Gambar 3. 11 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) UPTD Puskesmas X	47
Gambar 3. 12 Neraca UPTD Puskesmas X	48
Gambar 3. 13 Neraca UPTD Puskesmas X	49
Gambar 3. 14 Laporan Operasional UPTD Puskesmas X	50
Gambar 3. 15 Laporan Arus Kas UPTD Puskesmas X	52
Gambar 3. 16 Laporan Arus Kas UPTD Puskesmas X	53
Gambar 3. 17 Laporan Perubahan Ekuitas UPTD Puskesmas X	54
Gambar 3. 18 Catatan Atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas X	55
Gambar 3. 19 Catatan Atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas X	55

Gambar 3. 20 Catatan Atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas X	56
Gambar 3. 21 Catatan Atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas X	57
Gambar 3. 22 Catatan Atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas X	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pemikiran Magang**

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Bab I pasal 1 Nomor 2 menjelaskan tentang sebuah fasilitas dari pelayanan kesehatan pada tingkat pertama dengan mengutamakan kepada upaya dari promotif lalu preventif di bagian wilayah kerjanya yang pada umumnya disebut dengan Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas itu juga merupakan salah satu unit dari organisasi pemerintahan dengan tujuan pembangunannya untuk melakukan perbaikan dan juga pembangunan kepada masyarakat sekitar dari pelayanan tentang kesehatan.

Pemerintah yang khususnya ada pada Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi upaya terwujudnya kesehatan masyarakat sekitar wilayah tertentu untuk mendapatkan kesehatan yang bermutu. Dengan demikian salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan mengubah status dari Puskesmas yang sebelumnya berstatus sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018.

Peran dari Puskesmas itu sendiri dalam untuk meningkatkan suatu pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat mempunyai sebuah kemungkinan untuk dapat kewenangan yang lebih leluasa lagi untuk dapat mengelola anggaran pendapatan maupun pengeluarannya. Menurut Hendra Wijaya (2020) keleluasaan

tersebut akan didapatkan jika status dari Puskesmas tersebut berubah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Maka dari itu Puskesmas yang telah menjadi BLUD nantinya pada bagian Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), akan memiliki kemungkinan dari sebuah Puskesmas untuk dapat menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang di mana pendapatan dari layanan pasien yang didapatkan akan secara langsung masuk ke dalam pendapatannya tanpa harus disetor terlebih dahulu kepada kas negara. Dengan adanya proses seperti itu maka pertanggung jawaban dari keuangan dalam bentuk pelaporan menjadi kewajiban yang harus untuk dipenuhi.

Menurut, Hendra Wijaya (2020) dalam proses prosedur penyusunan laporan keuangan yang akan dilaporkan pada pada instansi pemerintahan daerah memiliki perbedaan dengan instansi swasta. Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka Puskesmas harus melakukan penyusunan laporan keuangan yang berbasis kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual. Maka dari itu mengacu kepada pedoman yang telah diatur di dalam sebuah Standar Akuntansi Pemerintah tentang Penyajian Laporan Keuangan PSAP Nomor 13 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Jika pada prosedur penyusunan laporan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, serta transparan dan akuntabilitas, maka kinerja dari internal instansi seperti puskesmas ini juga akan dianggap sangat baik dalam pengelolaan keuangannya. Namun dalam proses penyusunan laporan keuangan suatu BLUD, masih banyak di antaranya yang belum paham tentang

proses penyusunan laporan keuangan tersebut. Maka dari itu, beberapa BLUD menggunakan jasa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dari PT Syncore Indonesia untuk membantu mereka dalam penyusunan laporan keuangannya. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang disediakan oleh PT Syncore Indonesia bernama Syncore BLUD. Aplikasi tersebut berisi berbagai macam jenis laporan keuangan yang dibutuhkan oleh instansi BLUD untuk membuat laporan keuangan yang akan memudahkan mereka untuk nantinya melaporkan laporan keuangannya secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Setelah memaparkan dasar pemikiran di atas maka dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya prosedur penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah daerah, maka dari itu penulis tergerak dan membuat sebuah keputusan untuk mengambil pembahasan dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 013 PADA LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS X BERBASIS SYSTEM SYNCORE BLUD (BADAN LAYANAN UMUM DAERAH)”**.

## **1.2 Tujuan Magang**

1. Untuk mengetahui prosedur dari penyusunan sebuah laporan keuangan pada BLUD dengan menggunakan aplikasi sistem syncore blud.
2. Untuk melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada Puskesmas X sesuai dengan PSAP 013.
3. Untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan aplikasi system syncore blud.

### **1.3 Target Magang**

1. Mampu menjelaskan prosedur dari penyusunan sebuah laporan keuangan pada BLUD dengan menggunakan aplikasi sistem syncore blud.
2. Mampu melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada puskesmas X sesuai dengan PSAP 013.
3. Mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan aplikasi system syncore blud.

### **1.4 Bidang Magang**

Bidang magang penulis yaitu berada di Divisi Konsultan PT Syncore Indonesia. Sedangkan jenis pekerjaan magang yang dapat diberikan kepada penulis dapat meliputi pengamatan, pencatatan, atau penginputan data di sistem syncore blud.

### **1.5 Lokasi Magang**

Nama Perusahaan : PT Syncore Indonesia

Alamat : Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso,  
Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos : 55282

Nomor Telepon : (0274) 488599

Email : [marketing@syncoreconsulting.com](mailto:marketing@syncoreconsulting.com)  
[training@syncore.co.id](mailto:training@syncore.co.id)

Website : <https://syncore.co.id>



Gambar 1. 1 Lokasi PT Syncore Indonesia

## Lokasi PT Syncore Indonesia dari Google Maps

### 1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang dilaksanakan selama dua bulan yang dimulai pada tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 10 Mei 2021. Lalu kam kerja yang ditetapkan oleh PT Syncore Indonesia baik kepada karyawannya maupun kepada mahasiswa magang yaitu 6 hari kerja dalam waktu satu minggu, yang dimulai pukul 09.00 WIB s.d 17.00 WIB dengan sistem WFO (*Work Form Office*) , kecuali untuk pada hari sabtu jam kerja yang dilaksanakan yaitu dimulai pukul 09.00 WIB s.d 14.00 WIB dengan sistem WFH (*Work From Home*).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

##### **2.1.1 Pengertian**

Di dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 Nomor 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 (Permendagri 79/2018) mengatakan bahwa sebuah sistem yang telah diterapkan oleh sebuah unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah pada pemberian suatu pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai keistimewaan dengan sifat fleksibilitasnya untuk sebuah BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Fleksibilitas yang dimaksud yaitu adalah keleluasaan di dalam pengelolaan keuangannya dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat dalam prosesnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum serta juga mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Pasal 2 Bab I mengatakan bahwa adanya suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki tujuan memberikan sebuah pelayanan umum yang lebih baik dari segi keefektifannya, keefisienannya, keekonomisannya, serta ke-transparannya yang juga dilandaskan dengan sebuah tanggung jawab pada asas keadilan, lalu kepatutan dan juga memiliki manfaat melalui jalan praktek bisnis yang sehat untuk menunjang tercapainya sebuah tujuan dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya yang didasarkan dengan kewenangan dari delegasi yang dikirimkan oleh kepala daerah ke masing-masing wilayahnya.

Maka dari itu kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian BLUD merupakan sebuah Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki keistimewaan pada pengelolaan laporan keuangannya, namun juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dengan keistimewaan yang dimiliki tersebut.

### **2.1.2 Tujuan dan Asas Pengelolaan BLUD**

Menurut Pasal 2 ayat 1 s.d ayat 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 (Permendagri 79/2018) yaitu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan untuk dapat memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan juga bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat yang sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu dalam pencapaian dari tujuan Pemerintah Daerah (Pemda) yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Ada beberapa asas dalam pengelolaan BLUD yang harus dilaksanakan, antara lain:

- a. Kepala daerah bertanggung jawab dengan peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan umum
- b. Pejabat Pengelola BLUD memiliki tanggung jawab pelaksanaan dari sebuah manfaat yang dihasilkan dari pemberian layanan umum.
- c. BLUD adalah sebuah kekayaan dari daerah yang tidak dapat terpisah dari Pemda.
- d. BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

## **2.2 Akuntansi Keuangan Pemerintahan**

### **2.2.1 Pengertian**

Akuntansi pemerintahan biasanya dikatakan dengan Akuntansi Sektor Publik, yang di mana sebenarnya akuntansi pemerintahan sendiri termasuk kedalam akuntansi sektor publik. Menurut Indra Bastian (2019:3) menyatakan tentang definisi dari Akuntansi Sektor Publik sendiri adalah merupakan sebuah teknik mekanisme dan juga sebuah analisis dari akuntansi yang telah diterapkan kepada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara serta juga beberapa departemen yang di bawahinya seperti pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM serta beberapa dari yayasan sosial yang ada pada proyek kerja sama baik dengan sektor publik maupun swasta.

Selanjutnya pendapat dari Nurmalia Hazanah dan Achmad Fauzi (2017:1) mendefinisikan tentang akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas dari pemberian jasa untuk menyediakan informasi tentang keuangan pemerintah yang berdasarkan pada proses dari pencatatan, pengklasifikasian, dalam suatu transaksi keuangan pemerintah dan juga penafsiran atas informasi keuangannya.

Jika disimpulkan dari kedua definisi di atas maka akuntansi pemerintahan yang termasuk kedalam akuntansi dari sektor publik merupakan sebuah teknik mekanisme dan juga analisis dari proses akuntansi dari suatu aktivitas pada pemberian jasa guna mengadakan informasi tentang laporan keuangan pemerintah.

### **2.2.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintahan adalah sebuah bentuk organisasi dari sektor publik yang menyejahterakan rakyatnya, maka demi terwujudnya tujuan tersebut maka rakyat

pun membentuk sebuah aturan umum yang harus dipenuhi dan ditaati oleh bagian pemerintahan yang berupa konstitusi ataupun undang-undang dasar dan juga peraturan perundang-undangan yang lainnya (Nurmalia Hazanah dan Achmad Fauzi, 2017:2).

Menurut Nurmalia Hazanah dan Achmad Fauzi (2017:2) akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan dari akuntansi pemerintahan yaitu:

1. Akuntabilitas

Fungsi dari akuntabilitas memiliki makna luas dengan tidak hanya berupa ketaatan kepada undang-undang yang ada, namun juga harus memikirkan di dalam penggunaan dari sumber daya dengan bijaksana, serta juga efisien dan efektif yang ekonomis supaya dapat menyampaikan akuntabilitasnya pada laporan keuangannya.

2. Manajerial

Pemerintah melakukan perencanaan dalam upaya untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan juga strategi pada pembangunan lainnya.

3. Pengawasan

Pengawasan pada pengurusan keuangan Negara harus diadakan dan akan diperiksa langsung oleh bagian aparat yang berwenang, seperti BPK-RI (Badan Pengawas Keuangan-Republik Indonesia).

### **2.2.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Nurmalia Hazanah dan Achmad Fauzi (2017:3) akuntansi pemerintahan memiliki beberapa karakteristik berikut ini :

1. Tidak adanya laporan untuk laba.
2. Pemerintahan akan membukukan anggaran ketika anggaran tersebut telah dibukukan.
3. Dapat mengenakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akan membuat pembukuan proses pengeluaran modal pada perkiraan dari neraca dan juga hasil operasional.
5. Memiliki sifat yang tidak leluasa karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
6. Pada akuntansi pemerintahan tidak ada perkiraan dari modal dan juga laba ditahan pada neraca.

### **2.2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Mahsun (2016:65) mendefinisikan tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai sebuah prinsip yang akan diterapkan dalam proses penyusunan dan penyajian sebuah laporan keuangan pemerintahan. Dengan penerapan dari standar akuntansi pemerintah atau yang dapat disingkat SAP diharapkan dapat menciptakan transparansi, partisipasi dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Standar akuntansi pemerintahan juga perlu dikembangkan untuk dapat memperbaiki praktik akuntansi keuangan yang ada pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2016:271).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pasal 1 angka 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah merupakan sebuah prinsip akuntansi yang akan diterapkan ke dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Ada beberapa pernyataan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam buku Standar Akuntansi Pemerintahan 2020 yang menyatakan tentang beberapa pernyataan dari standar akuntansi pemerintahan yang telah diberikan penomoran seperti berikut ini :

1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan dari pernyataan tentang Standar Penyajian Laporan Keuangan yaitu untuk mengatur tentang penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran pada antar periode maupun pada antar entitas.

2. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Tujuan dari pernyataan tentang Standar Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas ini yaitu untuk penetapan dasar pada penyajian Laporan Realisasi Anggaran guna pemerintah dalam rangka pemenuhan tujuan dari akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga untuk sebuah informasi dari realisasi dan juga anggaran entitas pada pelaporan. Adanya perbandingan antara anggaran dan juga realisasinya dapat menunjukkan tingkat ketercapaian dari batas yang telah disepakati antara legislatif serta eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

### 3. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas

Tujuan dari pernyataan tentang Standar Laporan Arus Kas ini yaitu untuk mengatur dalam penyajian dari laporan arus kas yang akan memberikan informasi yang lalu mengenai adanya perubahan dari akun kas dan juga setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama dalam satu periode akuntansi. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, lalu perubahan kas dan juga setara kas dalam suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada saat tanggal pelaporan. Informasi tersebut disajikan guna untuk pertanggungjawaban dan pengambilan dari sebuah keputusan.

### 4. PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan dari pernyataan tentang Standar Catatan Atas Laporan Keuangan ini yaitu untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang dibutuhkan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang juga digunakan untuk meningkatkan transparansi dari Laporan Keuangan dan penyediaan dari pemahaman yang baik atas informasi keuangan pemerintah.

### 5. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

Tujuan dari pernyataan tentang Standar tentang Akuntansi Persediaan ini yaitu sebagai pengaturan dalam perlakuan dari akuntansi pada persediaan yang perlu untuk disajikan.

#### 6. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

Tujuan dari pernyataan tentang Akuntansi Investasi ini yaitu sebagai pengaturan perlakuan dari akuntansi pada bagian investasi serta menyampaikan sebuah informasi penting lainnya yang wajib disajikan ke dalam laporan keuangan.

#### 7. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Tujuan dari pernyataan tentang Akuntansi Aset Tetap ini yaitu sebagai pengaturan pada perlakuan dari akuntansi pada aset tetap yang meliputi mulai dari pengakuan, hingga penentuan dari nilai yang tercatat, serta sebagai penentuan dan perlakuan dari akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai yang tercatat (*carrying value*) aset tetap.

#### 8. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tujuan dari pernyataan tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan ini yaitu sebagai pengaturan perlakuan dari akuntansi untuk pada bagian konstruksi dalam proses pengerjaannya. Dalam pernyataan standar ini juga akan memberikan beberapa panduan untuk :

- a. Mengidentifikasi kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai konstruksi pada proses pengerjaan.
- b. Menetapkan jumlah biaya yang akan dihitung dan juga disajikan di neraca.
- c. Menetapkan basis pengakuan dan juga pengungkapan dari biaya konstruksi.

9. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

Tujuan dari pernyataan tentang Akuntansi Kewajiban ini yaitu sebagai pengaturan perlakuan dari akuntansi kewajiban pada saat pengakuan, penentuan nilai yang tercatat, saat amortisasi dan juga biaya pinjaman yang telah dibebankan kepada kewajiban tersebut.

10. PSAP 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan

Tujuan dari pernyataan tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan ini yaitu untuk menentukan kriteria dalam melakukan pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, beserta juga dengan perlakuan dari akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan serta operasi yang dihentikan.

11. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan dari pernyataan tentang Laporan Keuangan Konsolidasian ini yaitu untuk mengatur penyusunan pada laporan keuangan konsolidasian pada unit pemerintahan di dalam rangka menyajikan laporan keuangan dengan tujuan umum demi untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan dari laporan keuangan yang telah dimaksudkan tersebut. Tujuan umum yang dimaksud dalam laporan keuangan yaitu ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana yang telah

ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 12. PSAP 12 tentang Laporan Operasional

Tujuan dari pernyataan tentang Laporan Operasional ini yaitu sebagai penetapan dasar dari penyajian Laporan Operasional untuk pemerintahan di dalam rangka pemenuhan tujuan dari sebuah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penetapan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tujuan dari pernyataan ini yaitu sebagai pemberi informasi tentang kegiatan dari operasional keuangan yang tercermin di dalam pendapatan-LO, beban, dan juga surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

#### 13. PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Tujuan dari pernyataan tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu mengatur tentang penyajian dari laporan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan yang baik pada anggaran yang terjadi antar periode, maupun antar BLU. Supaya dapat terlaksana maka standar pernyataan ini membuat penetapan pada pertimbangan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, lalu pedoman struktur laporan keuangan dan juga persyaratan minimal dari isi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun pada PSAP 13 ini telah menetapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

#### 14. PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud

Tujuan dari pernyataan tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud yaitu untuk mengatur tentang perlakuan dari akuntansi untuk aset tak berwujud yang meliputi pengakuan, pengukuran penyajian dan juga pengungkapan.

#### 15. PSAP 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Tujuan dari pernyataan tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan yaitu untuk menentukan apabila pada setiap unit melakukan penyesuaian di laporan keuangannya karena adanya peristiwa yang terjadi setelah dari tanggal pelaporan dan juga membuat pengungkapannya tentang tanggal pelaporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada peristiwa setelah tanggal pelaporan. Selain itu pernyataan ini memberikan syarat bahwa unit tidak perlu melakukan penyajian laporan keuangannya dengan pendapatnya tentang kesinambungan unit apabila yang terjadi pada peristiwa setelah tanggal pelaporan memberikan indikasi bahwa penerapan pendapat kesinambungan entitas tidak bisa diterapkan.

### **2.3 Laporan Keuangan Daerah**

#### **2.3.1 Pengertian**

Laporan keuangan akan dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang nantinya kemudian akan dijadikan sebagai dasar dalam membuat sebuah laporan keuangan pemerintah provinsi atau kabupaten ataupun kota.

Menurut Ramli (2016:5) mendefinisikan tentang laporan keuangan daerah merupakan laporan keuangan oleh pemerintah daerah yang disusun dengan aturan

maupun standar keuangan yang telah berlaku.

Sedangkan menurut Ifat Fauziah (2018:66) mendefinisikan tentang laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu dari entitas pelaporan.

Jika disimpulkan dari kedua definisi di atas maka laporan keuangan daerah merupakan laporan oleh pemerintah daerah yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan juga transaksinya yang disusun dengan aturan maupun standar keuangan yang telah berlaku

### **2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Ramli (2016:15) tujuan dari adanya laporan keuangan yaitu sebagai penyaji dari sebuah informasi yang berisi tentang bagian keuangan, yang akan digunakan untuk para penggunanya dalam pembuatan serta pengevaluasian dari keputusan mengenai alokasi tentang sumber daya. Khususnya tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu untuk menyajikan sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan sebuah keputusan serta juga untuk menunjukkan akuntabilitas dari entitas pelaporan atas sumber dayanya yang telah diberikan kepercayaan, dengan beberapa ketentuan yaitu :

- a. Sebagai penyedia dari informasi tentang posisi dari sumber daya ekonomi, kewajiban, serta juga ekuitas dari dana pemerintah.
- b. Sebagai penyedia dari informasi mengenai perubahan pada sumber daya ekonomi, kewajiban dan juga ekuitas dari dana pemerintah.
- c. Sebagai penyedia dari informasi mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya dari ekonomi.

- d. Sebagai penyedia dari informasi mengenai ketaatan realisasi dari anggarannya.
- e. Sebagai penyedia dari informasi mengenai cara dari entitas pelaporan yang mendanai aktivitasnya dan juga memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Sebagai penyedia dari informasi mengenai potensi dari pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan dari pemerintah.
- g. Sebagai penyedia dari informasi yang akan berguna untuk mengevaluasi kemampuan dari entitas pelaporan dalam mendanai aktivitas yang terjadi.

### **2.3.3 Karakteristik Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Ramli (2016 : 10-12) karakteristik kualitatif dari laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan di dalam informasi akuntansi supaya dapat memenuhi tujuannya. Ada empat karakteristik pokok yang termasuk dalam laporan keuangan yaitu:

#### **1. Dapat dipahami**

Kualitas yang penting di dalam laporan keuangan daerah yaitu merupakan sebuah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakainya. Pemakai yang dimaksudkan itu diasumsikan telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas dari ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemampuan untuk dapat mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

#### **2. Relevan**

Informasi yang dihasilkan harus relevan untuk pemenuhan kebutuhan dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Laporan keuangan yang

dihasilkan dapat dikatakan relevan jika sebuah informasi yang terdapat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan dari penggunaanya untuk proses evaluasi dari peristiwa pada masa lalu ataupun masa kini, serta prediksi dari masa yang akan datang untuk dapat menegaskan ataupun mengoreksi hasil evaluasi yang diperoleh pada masa sebelumnya.

Namun, ada beberapa informasi yang relevan :

- a. Informasi memberikan penggunaan untuk dapat menegaskan ataupun mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- b. Informasi yang didapatkan membantu penggunaan untuk membuat perkiraan dari masa yang akan datang dengan hasil dari masa lampau dan kejadian masa kini.
- c. Penyajian informasi harus tepat waktu karena dapat berpengaruh dan juga berguna dalam pengambilan sebuah keputusan.
- d. Informasi tentang keuangan disajikan dengan lengkap yang mencakup semua informasi akuntansi yang memengaruhi pengambilan sebuah keputusan. Setiap informasi yang menjadi latar belakang pada setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan secara jelas supaya dapat mencegah penggunaan dari informasi yang keliru.

### 3. Andal

Laporan keuangan daerah dikatakan andal apabila terbebas dari pengertian yang menyesatkan, ataupun kesalahan yang terjadi secara material, disajikan setiap faktanya secara jujur, dan juga dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memiliki beberapa karakteristik yaitu :

- a. Penyajiannya jujur yaitu, informasi menggambarkan dengan jujur peristiwa yang harus disajikan.
- b. Dapat diverifikasi yaitu, informasi yang akan disajikan dalam suatu laporan keuangan dapat diuji dengan hasil yang baik.
- c. Netralis yaitu, informasi akan diarahkan kepada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4. Dapat dibandingkan

Proses pengukuran dan penyajian dari dampak laporan keuangan daerah dari transaksi dan peristiwa lain yang bentuknya serupa harus dapat dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut pada setiap periode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda supaya hasil akhirnya dapat dibandingkan antara periode saat ini dengan periode sebelumnya.

#### **2.3.4 Komponen Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan memiliki beberapa komponen yang terdapat di dalam satu set laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan juga laporan finansial. Menurut Nurmalia Hazanah dan Achmad Fauzi (2017:17-19) laporan keuangan terdiri dari tujuh komponen, yaitu :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan dari realisasi anggaran yaitu merupakan salah satu dari komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan tentang ikhtisar sumber, alokasi dan juga pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun daerah yang di dalamnya menggambarkan

tentang perbandingan antara anggaran dan juga realisasinya dalam suatu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LSAL)

Pada Laporan disini memberikan penyajian tentang adanya pemberian informasi dari meningkatnya ataupun menurunnya saldo anggaran lebih pada saat tahun pelaporan yang memiliki keterbandingan dengan tahun lalu. Laporan ini akan memberikan informasi tentang pemakaian dari Sisa Anggaran Lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) ataupun sumber dana yang telah dipakai untuk menutupi sisa kurang anggaran tahun lalu (SILKA), sehingga tersajikan sisa lebih ataupun kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.

c. Neraca

Neraca di dalam laporan keuangan memberi pandangan tentang posisi dari keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan juga ekuitas pada tanggal atau periode tertentu. Penjelasan dari masing-masing unsur yang telah disebutkan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Aset yaitu merupakan sumber daya ekonomi yang dikelola ataupun dimiliki oleh pemerintah karena akibat dari peristiwa masa sebelumnya dan juga dari mana manfaat ekonomi dan juga sosial di masa depan yang diharapkan akan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, yang dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Kewajiban yaitu merupakan utang yang timbul dari adanya peristiwa dimasa lalu yang mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas yaitu merupakan kekayaan bersih dari pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan juga kewajiban pemerintah.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional dalam laporan keuangan memberikan penyajian tentang ikhtisar dari sumber daya ekonomi yang akan memberikan penambahan ekuitas dan kegunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun daerah pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dalam masa satu periode pelaporan. Ada beberapa unsur di dalam Laporan Operasional yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan-LO yaitu sebuah hak dari pemerintah yang memiliki pengakuan sebagai tambahan dari nilai kekayaan bersih.
2. Beban yaitu sebuah hal yang harus bagi pemerintah untuk diakui sebagai pengurang dari nilai kekayaan bersih.
3. Transfer yaitu sebuah hak dari penerimaan ataupun peristiwa yang harus mengeluarkan uang dari ataupun oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas lainnya, yang termasuk pada dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan juga dana pembagian hasil.
4. Unit Luar Biasa yaitu merupakan sebuah penghasilan luar biasa atau kewajiban luar biasa yang terjadi karena kejadian ataupun proses yang bukan merupakan operasi biasa, tidak dianjurkan sering ataupun rutin

dan berada diluar kendali ataupun pengaruh entitas yang bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Pada laporan arus kas menghasilkan sebuah informasi kas yang memiliki hubungan dengan beberapa aktivitas seperti ,aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan juga aktivitas transitoris yang memberi pandangan tentang saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat dan juga daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut yaitu :

1. Penerimaan kas merupakan seluruh pemasukan transaksi kas yang masuk kepada bagian pengelolaan dari anggaran baik Negara maupun Daerah.
2. Pengeluaran kas merupakan seluruh pengeluaran transaksi kas yang masuk kepada bagian pengelolaan dari anggaran baik Negara maupun Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas pada komponen laporan keuangan memberikan sebuah informasi tentang adanya peningkatan ataupun penurunan dari ekuitas tahun pada saat pelaporan yang memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan pada komponen laporan keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh

ekuitas pelaporan dan informasi lainnya yang diharuskan dan juga dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta beberapa ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

### **2.3.5 Dasar Hukum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Ramli (2016:9-10), pelaporan dalam keuangan pemerintah yang diselenggarakan telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada bagian yang mengatur tentang keuangan dari negara.
2. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Undang-Undang di bidang Keuangan Negara.
4. Undang-undang yang mengatur tentang keuangan daerah.
5. Undang-undang yang mengatur tentang dana keuangan yang bersumber dari pendapatan APBN baik pada pemerintah pusat dan juga daerah.
6. Undang-undang lainnya yang mengatur tentang keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### **2.4 Proses Penyusunan Laporan Keuangan**

Proses penyusunan laporan keuangan menurut Erlina, dkk (2015) menyatakan bahwa suatu langkah yang dimulai dari penyusunan laporan keuangan yaitu dengan melakukan analisis transaksi terlebih dahulu berdasarkan dengan bukti transaksi yang ada saat ini. Salah satu tujuan utama dari analisis transaksi yaitu untuk dapat memudahkan dalam menentukan akun-akun yang nantinya akan disusun ke dalam

suatu laporan keuangan. Setelah proses dari menganalisis transaksi tersebut maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Jurnal adalah merupakan sebuah catatan sistematis dan juga kronologi dari setiap transaksi keuangan yang terjadi dengan memperkirakan akun bersaldo debit dan juga kredit. Selanjutnya setelah melakukan pencatatan ke dalam jurnal maka langkah berikutnya adalah memposting ke buku besar. Memposting ke buku besar merupakan sebuah proses pemindahan jumlah saldo pada saldo debit serta kredit ke akun penafsiran yang disediakan. Setelah jumlah saldo di dalam perkiraan akun sudah diketahui maka kemudian selanjutnya membuat neraca saldo yang berisikan tentang kumpulan dari seluruh rekening ataupun perkiraan akun buku besar.

Setelah neraca saldo selesai dibuat, lalu tahap selanjutnya adalah melakukan proses penyesuaian pada akun tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo tersebut. Jurnal penyesuaian yaitu adalah sebuah jurnal untuk menyesuaikan nominal rekening kepada nominal saldo yang sudah benar di akhir pelaporan periode. Selanjutnya setelah melakukan penyesuaian yaitu melakukan penyusunan penyesuaian maka langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dengan cara memasukkan nominal pada saldo yang benar berdasarkan dengan jumlah saldo akhir ke dalam postingan buku besar.

Pembuatan dan penyusunan sebuah laporan keuangan dapat dilakukan setelah neraca saldo setelah penyesuaian telah selesai disusun. Setelah laporan keuangan telah selesai disusun maka langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup akan digunakan untuk dapat menutup saldo nominal menjadi nol di akhir periode akuntansi nantinya. Saldo akun yang ada pada jurnal penutup terdiri

dari akun perkiraan modal, pendapatan dan juga beban. Setelah membuat jurnal penutup langkah selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Dan pada langkah terakhir yaitu melakukan konversi jika memang diperlukan.

## **2.5 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah**

Pelaporan dari keuangan daerah adalah merupakan salah satu bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut pada Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa pelaporan dari keuangan daerah yaitu sebuah kegiatan akuntansi yang dilakukan dengan menyusun serta menyajikan sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh bagian pelaporan keuangan yang dilakukan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi yang menghasilkan sebuah laporan keuangan pada periode tertentu.

Selanjutnya pada instansi pemerintahan, informasi mengenai keuangan paling sedikit berisi tentang informasi mengenai penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan juga laporan keuangan, dengan kegunaan yang dimaksud dalam PP No.12 Tahun 2019 yaitu :

1. Sebagai penunjang bagi kepala daerah untuk proses penyusunan anggaran daerah dan juga pada laporannya.
2. Sebagai penunjang bagi kepala daerah untuk perumusan kebijakannya.
3. Sebagai penunjang bagi daerah untuk melakukan evaluasi terhadap penilaiannya.

4. Sebagai penyedia tentang statistiknya.
5. Sebagai pendukung tentang ketransparanan pada masyarakatnya.
6. Sebagai pendukung tentang penyediaan informasinya.
7. Sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaannya.

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Gambaran Umum Puskesmas X**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) X merupakan sebuah Puskesmas yang berada di Kabupaten Sleman dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 264/Men.Kes./SK/III/2008 adalah merupakan Puskesmas Kelas C yang mempunyai kapasitas tempat tidur sebanyak 157 buah. Peresmian Puskesmas X ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2004 oleh Bupati Sleman yang juga bertepatan dengan Hari Jadi dari Kabupaten Sleman yang ke-383.

Pembangunan kesehatan adalah salah satu upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar dari rakyat dengan memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang bahkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak pada bidang kesehatan amandemen kedua UUD 1945 pada Pasal 34 Ayat (3) telah menetapkan bahwa Negara memiliki tanggung jawab tentang penyediaan dari fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan juga pelayanan umum yang layak.

##### **3.1.2 Tugas dan Fungsi Puskesmas X**

Tugas dari Puskesmas X, yaitu :

Puskesmas X memiliki tugas untuk dapat membantu Bupati Sambilegi di dalam pelaksanaan kewenangannya pada bidang kesehatan perorangan.

Fungsi dari Puskesmas X, yaitu :

- a. Sebagai pelaksanaan kebijakan pada daerahnya di bidang pelayanan kesehatan perorangan dalam pelayanan mengutamakan pengobatan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan juga pencegahan penyakit.
- b. Sebagai penyelenggara dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang pelayanan kesehatan.
- c. Sebagai penyelenggara kegiatan pelaksanaan kesehatan di Puskesmas X harus memperhatikan kaidah ekonomi tanpa mengabaikan fungsi sosial kepada masyarakat sebagai kewajiban Puskesmas yang dimiliki Pemerintah.
- d. Sebagai pembinaan dan juga pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah serta lembaga lainnya.
- e. Sebagai pengelola urusan bagian tata usaha serta bagian keuangan.
- f. Sebagai pelaporan atas hasil dari pelaksanaan tugas.
- g. Sebagai pelaksanaan tugas dari kedinasan lain yang telah diberikan oleh Bupati Sambilegi.

### **3.2.3 Visi dan Misi Puskesmas X**

**Visi :**

Menjadikan Puskesmas X sebagai **Puskesmas Idaman Semua Masyarakat.**

**Misi :**

1. Memberikan sebuah pelayanan kesehatan yang tepat, cepat dan juga tanggap.

2. Menyediakan sebuah fasilitas layanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang lengkap, aman, nyaman dan juga berkualitas.
3. Mendukung akan terciptanya dari lingkungan masyarakat yang sehat.
4. Mendorong tumbuhnya kesadaran dari masyarakat untuk dapat hidup bersih dan juga sehat melalui sebuah layanan yang disediakan oleh Puskesmas berupa sebuah layanan konseling dan juga konsultasi yang dapat diakses via online (whatsapp) , telpon dan juga sms.

#### **3.1.4 Jenis Pelayanan di Puskesmas X**

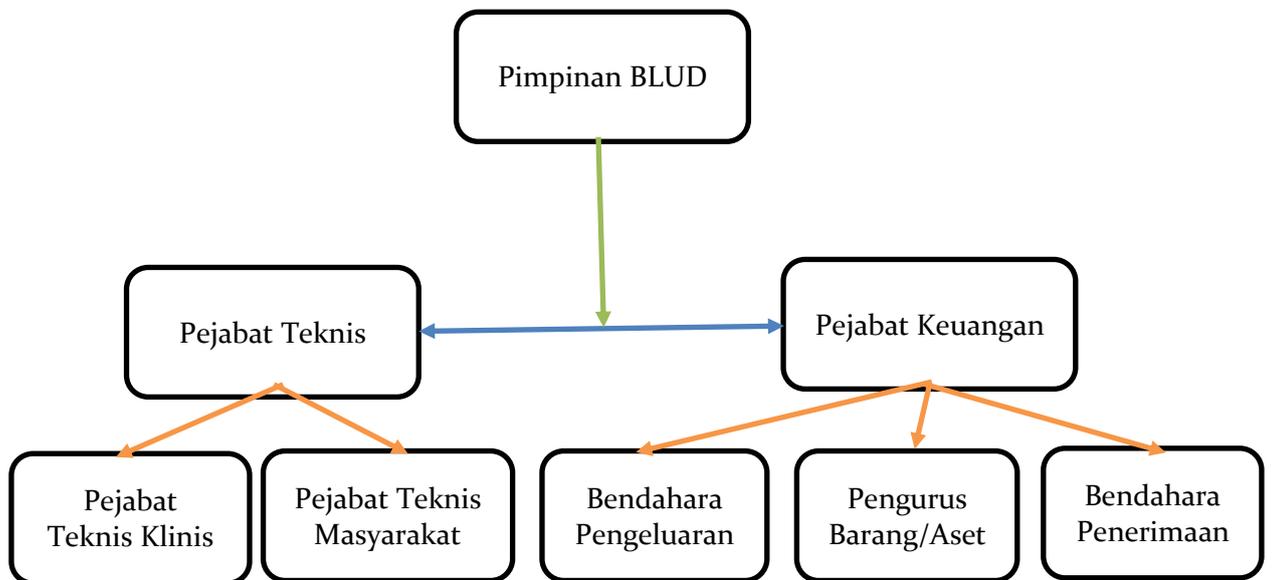
Kegiatan utama pada Puskesmas X yaitu dalam usaha pelayanan dibidang kesehatan perorangan dengan pendekatan pelayanan medis, tindakan medis, keperawatan, pelayanan penunjang medis, pelayanan rawat inap dan juga upaya rujukan. Upaya kegiatan utama tersebut akan dilakukan dengan core bisnis yang merupakan pelayanan melalui upaya kesehatan dengan meliputi promotif, preventif, kuratif dan juga rehabilitative dengan meliputi beberapa kegiatan yaitu :

1. Upaya Kesehatan Perorangan
  - a. Pelayanan Poli Umum
  - b. Pelayanan Poli Gigi
  - c. Pelayanan KIA KB
  - d. Pelayanan Gawat Darurat
  - e. Pelayanan Gizi
  - f. Pelayanan Persalinan
  - g. Pelayanan Farmasi/Obat-obatan
  - h. Pelayanan Laboratorium Sederhana

- i. Klinik Sanitasi
  - j. Pelayanan Senam Sehat Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS)
2. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
- a. Pelayanan Promosi Kesehatan
  - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
  - d. Pelayanan Gizi
  - e. Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
  - f. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
- a. Pelayanan Kesehatan Jiwa
  - b. Pelayanan Kesehatan Olahraga
  - c. Pelayanan Kesehatan Gigi
  - d. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
  - e. Pelayanan Kesehatan Kerja
  - f. Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah
  - g. Pelayanan Posbindu PTM (Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular)
4. Pelayanan Ambulans
5. Pelayanan Parkir dan Kantin

### 3.1.5 Susunan Pejabat Pengelola UPT BLUD Puskesmas X

Pejabat Pengelola BLUD pada Puskesmas X yaitu :



#### 1. Pimpinan BLUD

Fungsi dari Pimpinan BLUD, yaitu :

- a. Menyiapkan Dokumen dari RenStra Bisnis BLUD.
- b. Menyiapkan RBA Tahunan.
- c. Memberikan usulan untuk calon pejabat keuangan dan juga pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memberikan penyampaian tentang pertanggung jawaban dari kinerja operasional dan keuangan BLUD.

#### 2. Pejabat Keuangan

Ada beberapa bagian pada Pejabat Keuangan yaitu :

- a. Fungsi Pejabat Keuangan, yaitu :
  1. Mengoordinasikan penyusunan dari RBA.

2. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja BLUD.
  3. Melakukan penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen keuangan BLUD.
  4. Melakukan penyelenggaraan akuntansi dan juga penyusunan laporan keuangan.
- b. Fungsi dari Bendahara Penerimaan, yaitu :
1. Menerima aliran kas masuk.
  2. Melakukan pengelolaan pada piutang.
  3. Melakukan pengelolaan pada pendapatan.
  4. Melakukan penginputan tentang penerimaan aliran kas masuk ke sistem.
- c. Fungsi dari Bendahara Pengeluaran, yaitu :
1. Mencatat aliran kas keluar.
  2. Melakukan pengelolaan pada utang.
  3. Melakukan pengelolaan pada belanja.
  4. Melakukan penginputan tentang pengeluaran aliran kas masuk ke sistem.
- d. Fungsi dari Pengurus Barang Aset, yaitu :
1. Melakukan penyusunan atas kebijakan dari pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUD
  2. Melakukan pengurusan dan pemeliharaan barang/aset.
3. Pejabat Teknis
- Pada bagian Pejabat Teknis terdiri dari 2 bagian, yaitu :

a. Bidang Pelayanan Klinis

1. Melakukan penyusunan pada perencanaan kegiatan teknis pada bidangnya.
2. Melakukan pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan RBA.
3. Mempertanggung jawabkan kinerja dari operasional pada bidang pelayanan Klinis.

b. Pejabat Teknis Bidang Pelayanan Masyarakat

1. Melakukan penyusunan pada perencanaan kegiatan teknis pada bidangnya.
2. Melakukan pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan RBA.
3. Mempertanggung jawabkan kinerja dari operasional pada bidang pelayanan Masyarakat.

## **3.2 Data Khusus**

### **3.2.1 Profil Singkat PT Syncore Indonesia**

PT Syncore Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang berbasis teknologi akuntansi yang memberikan layanan dibidang keuangan dengan mengedepankan pada teknologi. Syncore Indonesia juga bergerak secara terintegrasi di berbagai bidang, seperti bidang konsultasi, bidang pengembangan sistem, bidang penyedia training dan juga bidang media. Syncore Indonesia telah melakukan sebuah transformasi yang dijadikan suatu organisasi yang akan terus melakukan pergerakan dan selalu memberikan syafaatnya untuk internal perusahaan, maupun eksternal perusahaan seperti masyarakat untuk mewujudkan rasa kewirausahaannya, serta memperkuat pengelolaannya dan juga memberikan

peningkatan kinerjanya agar dapat memberikan manfaat yang dapat langsung dirasakan bagi Indonesia.

Syncore Indonesia didirikan pada tahun 2010 dengan pada sejarah awal kami yaitu merupakan sebuah perusahaan konsultan keuangan manajemen bisnis di beberapa perusahaan swasta. Namun, dengan berjalannya waktu perusahaan Syncore Indonesia berkembang dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLU).

### **3.2.2 Program Syncore Indonesia**

Syncore Indonesia sendiri memiliki beberapa program yaitu :

1. BLUD.co.id

BLUD.co.id adalah merupakan sebuah program yang digunakan untuk pelatihan, lalu pendampingan dan juga penyediaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Program ini telah banyak digunakan oleh beberapa lembaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Puskesmas BLUD, RSUD BLUD, dan lain sebagainya.

2. Bumdes.id

Bumdes.id adalah merupakan sebuah program yang digunakan untuk menumbuhkan, menguatkan dan juga mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berada di seluruh Indonesia. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program Bumdes.id ini seperti pelatihan, Training Of Trainer (TOT), pendampingan Bumdes, layanan

digital berupa cek kesehatan usaha Bumdes, Sekolah Bumdes Online, dan kebijakan bekerja sama dengan Kementerian serta Perguruan Tinggi.

### 3. Kejar UMKM dan Komunitas JagoBiznis

Kejar UMKM dan Komunitas JagoBiznis merupakan sebuah komunitas untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang siap untuk naik kelas serta juga berniat untuk transformasi ke era Digital. Pada program ini juga telah disediakan beberapa layanan seperti layanan untuk pelatihan dan pendampingan untuk UMKM, Start-Up, Wirausaha Desa, Petani dan Nelayan akan diberikan dengan landasan tema Kewirausahaan, Keuangan, Manajemen dan Bisnis (KKMB).

### 4. eSPI

Program eSPI dengan Risk Monitoring adalah merupakan sebuah metodologi dan juga aplikasi yang dimiliki oleh kami dengan tujuan untuk membantu SPI (Satuan Pengawas Internal) untuk beberapa lembaga. Program eSPI ini biasanya digunakan untuk beberapa lembaga yang membutuhkan pengawasan pada sistem internalnya, baik untuk Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Pada aplikasi ini juga dipergunakan untuk membuat penerapan baru pada paradigma dari SPI, membuat perencanaan audit berbasis risiko, membuat prosedur pemeriksaan serta pembinaannya, dan juga membuat pelaporan serta monitoring sebagai tindak lanjutnya.

### 5. Learning.co.id

Program learning.co.id merupakan salah satu program inovasi

terbaru di Syncore Indonesia ini yang berdiri pada Tahun 2020. Learning.co.id ini merupakan sebuah salah satu media untuk pembelajaran daring yang dapat digunakan tanpa batasan waktu sehingga dapat tetap efektif dengan metode pembelajaran online saat ini.

### **3.2.3 Visi, Misi, dan Motto PT Syncore Indonesia**

#### **Visi :**

Melahirkan sebuah Lembaga yang akan terus berproses serta selalu memberikan syafaatnya baik bagi internal perusahaan, eksternal perusahaan, maupun masyarakat sekitar untuk menciptakan jiwa kewirausahaan pada dirinya.

#### **Misi :**

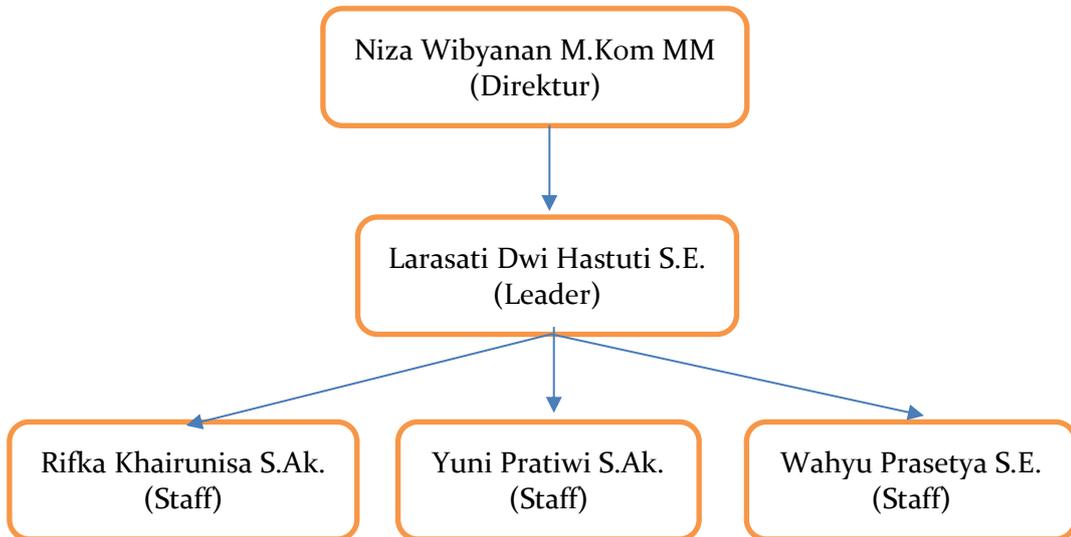
1. Menyediakan sebuah Layanan Konsultasi yang memiliki kualitas dengan harga yang dapat dijangkau.
2. Mengembangkan Sistem Informasi terintegrasi yang sinkron dan juga adaptif.
3. Menyediakan Training yang sesuai dengan kebutuhan, secara aplikatif dan juga menyenangkan.
4. Membangun media digital yang kreatif dan juga edukatif.
5. Menyediakan dukungan sarana juga prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengembangan usaha dan juga keberlanjutan kelestarian lingkungan.

#### **Motto :**

Lead and Excellent (mengikuti perkembangan terbaru dan memberikan layanan prima yang terbaik untuk klien).

### 3.2.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada pada PT Syncore Indonesia Divisi Konsultan :



### 3.2.5 Aplikasi Syncore BLUD

Aplikasi syncore blud merupakan sebuah software tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) yang dapat menangani proses dari Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD dimulai dari untuk Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sampai dengan Pelaporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Aplikasi Syncore bersifat online dengan jaringan internet yang dapat diakses melalui Jalur Secure (HTTPS) yang dapat dipercaya, karena telah bekerja sama dengan Penyedia Jasa Internet dengan Skala Nasional yang dapat dipercaya dan juga diandalkan.

Aplikasi ini juga telah dirancang untuk dapat dengan mudah dioperasikan oleh para penggunanya. Selain itu, aplikasi ini juga terdapat tingkatan hak akses *user* dan *password* yang berbeda-beda untuk mengaksesnya. Hal ini diupayakan supaya

kerahasiaan dari dokumen klien yang ada dapat terjaga dengan baik dan hanya dapat diakses dengan para pengguna yang memiliki kepentingan dan tugasnya pada suatu instansi.

### **3.2.6 Kelebihan dan Kekurangan dari Aplikasi Syncore BLUD**

Aplikasi Syncore BLUD ini sudah dirancang dengan sebaik mungkin untuk dapat digunakan oleh klien dengan nyaman, dan juga tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Aplikasi Syncore BLUD ini memiliki beberapa kelebihan yaitu :

1. Akan secara langsung menghasilkan laporan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Laporan Standar Akuntansi Keuangan (LK SAK).
2. Konsolidasi dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).
3. Pengaksesannya dapat dilakukan tanpa batasan waktu.
4. Memiliki pengamanan security yang aman dan juga sesuai dengan standar yang ada.
5. Dapat dengan mudah digunakan dan bersifat leluasa atau tidak kaku sehingga dapat disesuaikan dengan aturan yang telah berlaku.
6. Penjaminan dari adanya pendampingan serta perbaikan sistem secara online.
7. Dapat digunakan lebih dari satu user dengan level pengaksesan yang disesuaikan dengan bagiannya masing-masing.
8. Sistemnya selalu terupdate mengikuti peraturan yang sedang berlaku.
9. Alur pada penatausahaan disesuaikan dengan SOP Instansi.
10. Disediakan juga template untuk jurnal penutup buku.

Namun karena aplikasi ini merupakan rancangan dari manusia maka pastinya tidaklah terlepas dari kata sempurna dan memiliki beberapa kekurangan. Beberapa kekurangan yang ada pada aplikasi Syncore BLUD ini yaitu :

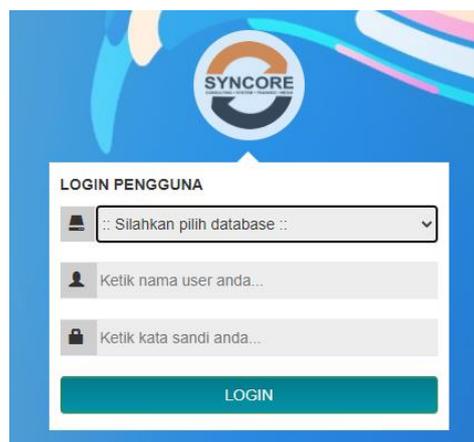
1. Hanya dapat diakses dengan kondisi internet yang online dan tidak dapat diakses saat internet sedang trouble atau offline.
2. Terkadang mengalami error sistem yang biasanya terjadi karena perangkat yang digunakan oleh user mengalami gangguan sehingga tidak dapat bekerja dengan semestinya.
3. Terkadang saat melakukan pengaksesan mengalami perlambatan penginputannya karena kondisi koneksi internet dari beberapa daerah yang kurang stabil.
4. Belum ada sistem untuk penginputan piutang.

### **3.2.7 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan melalui Aplikasi Syncore BLUD**

Untuk proses penyusunan dari laporan keuangan Puskesmas X yang telah menjadi BLUD, Puskesmas X menggunakan jasa aplikasi dari PT Syncore Indonesia yang bernama Syncore BLUD. Dalam proses penyusunan laporan keuangan melalui Syncore BLUD hanya dapat dilakukan oleh beberapa pegawai tertentu saja yang memang bertugas dalam proses penginputan laporan keuangan dengan melalui mekanisme login untuk dapat mengakses aplikasinya. Dengan adanya mekanisme login maka akan dapat menghindari adanya kemungkinan dari penyalahgunaan wewenang dari pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Pada setiap awal periode akuntansi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) akan menggunakan saldo akhir periode sebelumnya menjadi saldo awal pada akhir periode akuntansinya. Contohnya pada saldo awal periode akuntansi yakni per-31 Desember 2020 akan menjadi saldo awal periode akuntansi 1 Januari 2021. Dalam proses penyusunan saldo awal melalui sistem aplikasi Syncore BLUD ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu :

1. Log in ke sistem BLUD 2.5 melalui website dan dengan menggunakan username dan password yang telah disediakan. Setelah masuk ke alamat yang telah disediakan maka akan muncul tampilan pada layar seperti di bawah ini :



Gambar 3. 1 Tampilan Log-in (sumber : Blud.co.id)

2. Lalu pilih menu dengan tulisan “AKUNTANSI” yang tertera pada sistem.



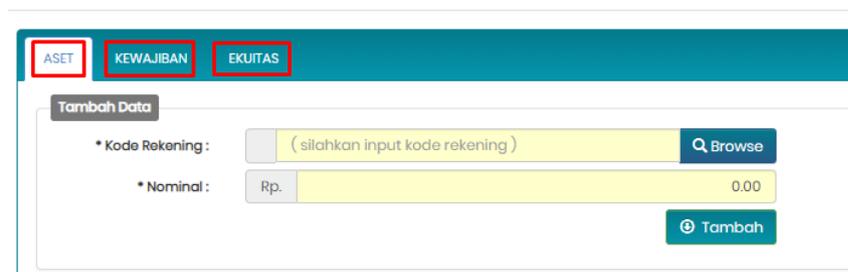
Gambar 3. 2 Menu Utama (sumber : Blud.co.id)

- Setelah itu pilih sub menu dengan tulisan “SALDO AWAL” yang tertera pada sistem.



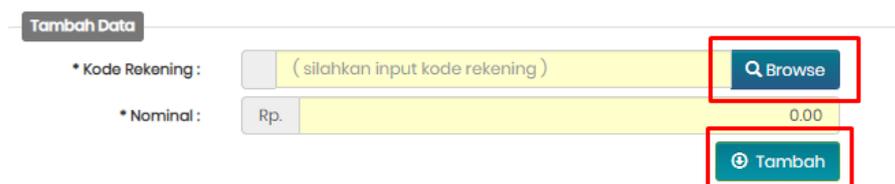
Gambar 3. 3 Sub-Menu dari Menu Akuntansi (sumber : Blud.co.id)

- Selanjutnya pilih kategori saldo awal yang akan diinput ke sistem yang terdiri dari aset, kewajiban dan juga ekuitas.



Gambar 3. 4 Sub-Menu dari Menu Saldo Awal (sumber : Blud.co.id)

- Setelah itu mengisi ke bagian “kode rekening dan nominal” . Untuk mengisi pada bagian kode rekening silahkan klik tombol bertuliskan “browse”, lalu kode rekening akan muncul dan silahkan klik tombol yang bertuliskan “pilih” pada rekening yang akan diisikan saldo awalnya. Dan untuk saldo awal rekening yang telah dipilih diisikan pada bagian “Nominal”.

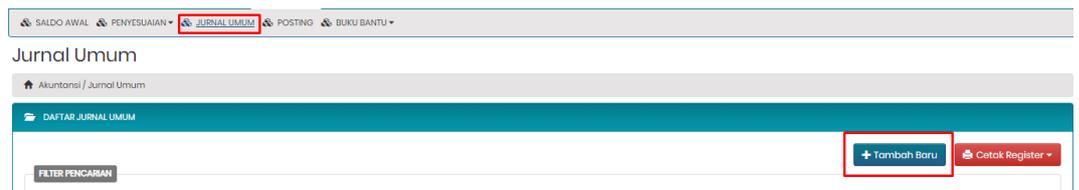


Gambar 3. 5 Menu pada Bagian Aset/Kewajiban/Ekuitas (sumber : Blud.co.id)

6. Setelah mengisi kode rekening dan nominal selanjutnya klik tombol “tambah”.
7. Maka proses penginputan saldo awal telah selesai diproses.

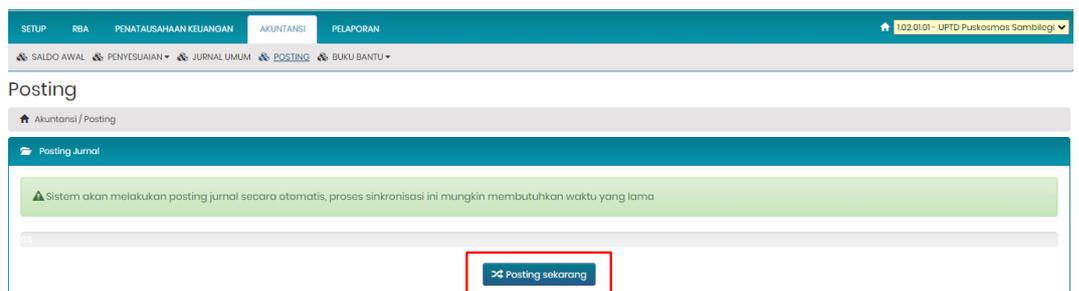
Sedangkan untuk proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan dengan sistem Syncore BLUD, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan yaitu :

1. Pada Bagian Akuntansi akan mengisi saldo awal seperti yang sudah dijelaskan di atas pada awal periodenya.
2. Lalu selanjutnya bagian akuntansi membuat jurnal yang diperlukan pada saat akhir periode akuntansi.



Gambar 3. 6 Sub-Menu pada Bagian Jurnal Umum (sumber : Blud.co.id)

3. Setelah itu bagian akuntansi akan melakukan posting ke buku besar menggunakan menu posting yang telah tersedia di dalam sistem.



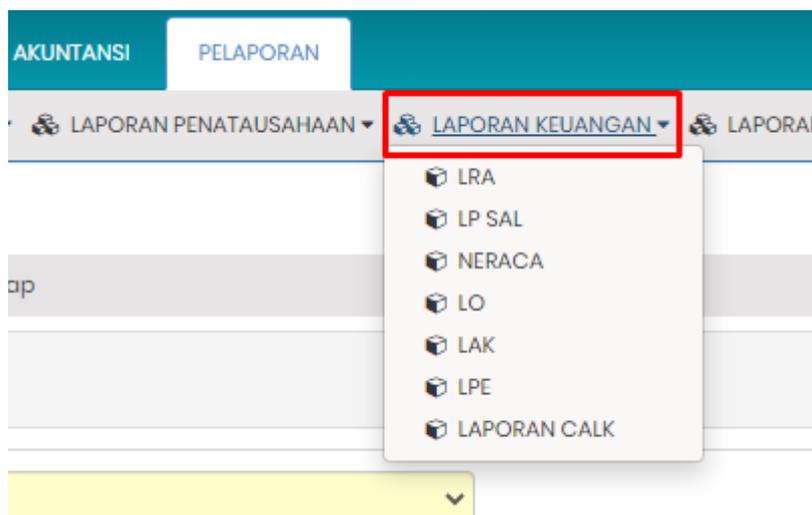
Gambar 3. 7 Menu Posting (sumber : Blud.co.id)

4. Lalu, bagian akuntansi akan memeriksa dan mencetak Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh sistem dengan cara mengklik bagian yang bertuliskan “PELAPORAN”.



Gambar 3. 8 Menu Utama (sumber : Blud.co.id)

5. Setelah itu klik tulisan “LAPORAN KEUANGAN” dan pilih laporan keuangan mana yang ingin dicetak atau hanya sekedar di pratinjau saja.



Gambar 3. 9 Sub-Menu Laporan Keuangan (sumber : Blud.co.id)

### 3.2.8 Penyajian Laporan Keuangan BLUD pada Puskesmas X

Setiap transaksi ekonomi yang dilakukan di dalam suatu Lembaga ataupun Organisasi harus mempertanggung jawabkan tentang transaksi bagian keuangannya dari hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Pada Puskesmas X yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas transaksi keuangan yang telah terjadi dalam setiap periodenya sesuai dengan PSAP yang berlaku.

Berikut ini merupakan beberapa penjelasan atas penyajian dari laporan keuangan Puskesmas X :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan gambaran dari perbandingan antara anggaran yang sebelumnya telah dirancang dengan realisasinya yang terjadi.

Berikut ini merupakan Laporan Realisasi Anggaran dari Puskesmas X :



**KABUPATEN SAMBILEGI**  
**Dinas Kesehatan**  
**UPTD Puskesmas X**

Jl. Raya Solo - Yogyakarta, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**Tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
1	<b>PENDAPATAN</b>		
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1,000,000,000.00	431,000,000.00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	175,000,000.00	390,500,000.00
4	Pendapatan Hibah	0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	40,000,000.00	85,000,000.00
6	Pendapatan Usaha Lainnya	40,000,000.00	200,000,000.00
7	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,255,000,000.00</b>	<b>1,106,500,000.00</b>
8	<b>BELANJA</b>		
9	<b>BELANJA OPERASI</b>		
10	Belanja Pegawai	100,000,000.00	400,450,000.00
11	Belanja Barang dan Jasa	1,592,000,000.00	62,000,000.00
12	Bunga	0.00	0.00
13	Belanja Lain-lain	0.00	0.00
14	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1,692,000,000.00</b>	<b>462,450,000.00</b>
15	<b>BELANJA MODAL</b>		
16	Belanja Modal Tanah	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,338,000,000.00	719,750,000.00
18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
20	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
21	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>3,538,000,000.00</b>	<b>1,919,750,000.00</b>
22	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,230,000,000.00</b>	<b>2,382,200,000.00</b>
23	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(3,975,000,000.00)</b>	<b>(1,275,700,000.00)</b>
24	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	<b>PENERIMAAN</b>		
26	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>		
27	Penggunaan SILPA	150,000,000.00	0.00
28	Penerimaan Pinjaman	50,000,000.00	0.00
29	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00
30	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	0.00	0.00
31	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
32	<b>PENGELUARAN</b>		
33	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
34	Pembayaran Pokok Pinjaman	50,000,000.00	0.00
35	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00
36	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	0.00	0.00
37	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
38	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
39	<b>SILPA/(SIKPA)</b>	<b>(3,825,000,000.00)</b>	<b>(1,275,700,000.00)</b>

Gambar 3. 10 Laporan Realisasi Anggaran UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Pada Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan menyajikan sebuah informasi tentang kenaikan ataupun penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun saat ini dengan tahun yang sebelumnya.

Berikut ini merupakan Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Puskesmas X :



**KABUPATEN SAMBILEGI**  
**Dinas Kesehatan**  
**UPTD Puskesmas X**  
Jl. Raya Solo - Yogyakarta, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY

---

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5,069,850,000.00
2	Penggunaan SAL	0.00
3	<b>Sub Total (1 - 2)</b>	<b>5,069,850,000.00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(1,275,700,000.00)
5	<b>Sub Total (3 + 4)</b>	<b>3,794,150,000.00</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00
7	Lain-lain	(30,000,000.00)
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>3,764,150,000.00</b>

Gambar 3. 11 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)

## 3. Neraca

Neraca pada laporan keuangan menggambarkan tentang posisi keuangan entitas mengenai aset, lalu kewajiban dan juga ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020.

Berikut ini merupakan Laporan Neraca dari Puskesmas X :



**KABUPATEN SAMBILEGI**  
**Dinas Kesehatan**  
**UPTD Puskesmas X**

Jl. Raya Solo - Yogyakarta, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY

**NERACA**  
**Tahun 2020**

No	Uraian	Tahun 2020
1	<b>ASET</b>	
2	<b>ASET LANCAR</b>	
3	Kas dan Setara Kas	4,064,500,000.00
4	Piutang Pendapatan	30,500,000.00
5	Penyisihan Piutang	0.00
6	Beban Dibayar Dimuka	0.00
7	Persediaan	2,000,000.00
8	Investasi Jangka Pendek BLUD	0.00
9	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah (APBD)	0.00
10	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>4,097,000,000.00</b>
11	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	
12	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00
13	Investasi Jangka Panjang Non Permanen lainnya	0.00
14	Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00
15	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0.00</b>
16	<b>ASET TETAP</b>	
17	Tanah	1,200,000,000.00
18	Peralatan dan Mesin	700,000,000.00
19	Gedung dan Bangunan	15,000,000,000.00
20	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00
21	Aset Tetap Lainnya	0.00
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00
23	Akumulasi Penyusutan	(10,000,000.00)
24	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>16,890,000,000.00</b>
25	<b>DANA CADANGAN</b>	
26	Dana Cadangan	0.00
27	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0.00</b>
28	<b>ASET LAINNYA</b>	
29	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00
30	Aset Tidak Berwujud	50,000,000.00
31	Aset Lain-lain	0.00
32	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.00
33	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0.00
34	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>50,000,000.00</b>
35	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>21,037,000,000.00</b>
36	<b>KEWAJIBAN</b>	
37	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
38	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	200,000.00
39	Utang Bunga	0.00
40	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0.00
41	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00
42	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00
43	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00
44	Utang Belanja	90,000,000.00
45	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>90,200,000.00</b>
46	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
47	Utang kepada Pemerintah Pusat	0.00
48	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0.00

*Gambar 3. 12 Neraca UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)*

No	Uraian	Tahun 2021
49	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0.00
50	Utang kepada Masyarakat	0.00
51	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0.00</b>
52	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>90,200,000.00</b>
53	<b>EKUITAS</b>	
54	<b>EKUITAS</b>	
55	EKUITAS	20,966,550,000.00
56	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>20,966,550,000.00</b>
57	<b>JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS</b>	<b>21,056,750,000.00</b>

*Gambar 3. 13 Neraca UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)*

#### 4. Laporan Operasional (LO)

Pada bagian laporan operasional akan menyajikan berbagai unsur seperti unsur pendapatan-LO, beban, dan juga surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Berikut ini merupakan Laporan Operasional (LO) dari Puskesmas X :



**KABUPATEN SAMBILEGI**  
**Dinas Kesehatan**  
**UPTD Puskesmas X**

Jl. Raya Solo - Yogyakarta, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Tahun 2020**

No	Uraian	Tahun 2020
1	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
2	<b>PENDAPATAN</b>	
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	431,000,000.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan	390,500,000.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	85,000,000.00
6	Pendapatan Hibah	0.00
7	Pendapatan Usaha Lainnya	200,000,000.00
8	Pendapatan APBN/APBD	350,000,000.00
9	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,456,500,000.00</b>
10	<b>BEBAN</b>	
11	Beban Pegawai	400,450,000.00
12	Beban Persediaan	12,000,000.00
13	Beban Jasa	0.00
14	Beban Pemeliharaan	0.00
15	Beban Langganan Daya dan Jasa	50,000,000.00
16	Beban Perjalanan Dinas	0.00
17	Beban Penyusutan Aset	0.00
18	Beban Bunga	0.00
19	Beban Pegawai APBD	50,000,000.00
20	Beban Barang dan Jasa APBD	0.00
21	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>512,450,000.00</b>
22	<b>SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL</b>	<b>944,050,000.00</b>
23	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0.00</b>
24	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non lancar	0.00
25	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0.00
26	Lainnya	0.00
27	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0.00</b>
28	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>944,050,000.00</b>
29	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0.00</b>
30	Pendapatan Luar Biasa	0.00
31	Beban Luar Biasa	0.00
32	<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>	<b>0.00</b>
33	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO (26 + 30)</b>	<b>944,050,000.00</b>

Gambar 3. 14 Laporan Operasional UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)

## 5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada laporan keuangan menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas, dan juga setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Berikut ini merupakan Laporan Arus Kas dari Puskesmas X :



**KABUPATEN SAMBILEGI**  
**Dinas Kesehatan**  
**UPTD Puskesmas X**

Jl. Raya Solo - Yogyakarta, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY

**ARUS KAS**  
**Tahun 2020**

No	Uraian	Tahun 2020
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	
	Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum Rawat Jalan- LO	215,500,000.00
	Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum Rawat Inap - LO	215,500,000.00
	Pendapatan Kapitasi BPJS - LO	500,000.00
	Pendapatan Rawat Inap dan Persalinan - LO	250,000,000.00
	Pendapatan Ambulance - LO	50,000,000.00
	Pendapatan Prolanis - LO	20,000,000.00
	Pendapatan Rujukan - LO	25,000,000.00
	Pendapatan Jasa Layanan Jampersal - LO	50,000,000.00
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - Parkir - LO	25,000,000.00
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - Kantin - LO	60,000,000.00
	Pendapatan Sewa - LO	200,000,000.00
	Dana Bantuan Operasional Khusus (BOK) - LO	350,000,000.00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	250,000.00

No	Uraian	Tahun 2020
3	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1,470,000,000.00</b>
4	<b>Arus Keluar Kas</b>	
	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1,200,000,000.00
	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	100,000,000.00
	Alat Kedokteran Gawat Darurat	150,000,000.00
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	150,000,000.00
	Alat Laboratorium Farmasi	100,000,000.00
	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	200,000,000.00
	Koreksi Ekuitas	30,000,000.00
	Pendapatan Kapitasi BPJS – LO	5,000,000.00
	Pendapatan Jasa Giro – LO	0.00
	Beban luran Jaminan Kesehatan	30,000,000.00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja	270,450,000.00
	Beban luran Jaminan Kematian	100,000,000.00
	Beban Pegawai APBD	50,000,000.00
	Beban Bahan-Bahan Kimia	10,000,000.00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,000,000.00
	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	50,000,000.00

Gambar 3. 15 Laporan Arus Kas UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)

No	Uraian	Tahun 2020
	Belanja Modal Peralatan Komputer	20,000,000.00
5	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>3,127,450,000.00</b>
6	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>(1,657,450,000.00)</b>
7	<u><b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b></u>	
8	<b>Arus Masuk Kas</b>	
9	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>0.00</b>
10	<b>Arus Keluar Kas</b>	
11	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>0.00</b>
12	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi</b>	<b>0.00</b>
13	<u><b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b></u>	
14	<b>Arus Masuk Kas</b>	
15	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>0.00</b>
16	<b>Arus Keluar Kas</b>	
17	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>0.00</b>
18	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pendanaan</b>	<b>0.00</b>
19	<u><b>Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris</b></u>	
20	<b>Arus Masuk Kas</b>	
	Utang PPN	1,580,000.00
21	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1,580,000.00</b>
22	<b>Arus Keluar Kas</b>	
	Utang PPN	1,380,000.00
23	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>1,380,000.00</b>
24	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris</b>	<b>200,000.00</b>
25	<b>Kenaikan/Penurunan Kas BLUD</b>	<b>(1,657,250,000.00)</b>
26	<b>Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD</b>	<b>5,068,850,000.00</b>
27	<b>Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD</b>	<b>3,411,600,000.00</b>

Gambar 3. 16 Laporan Arus Kas UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)

## 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Pada bagian laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi tentang kenaikan ataupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini merupakan Laporan Perubahan Ekuitas dari Puskesmas X :



**KABUPATEN SAMBILEGI**  
**Dinas Kesehatan**  
**UPTD Puskesmas X**

Jl. Raya Solo - Yogyakarta, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020
1	EKUITAS AWAL	20,052,500,000.00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	944,050,000.00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0.00
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00
6	LAIN-LAIN	(30,000,000.00)
7	EKUITAS AKHIR	20,966,550,000.00

Gambar 3. 17 Laporan Perubahan Ekuitas UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)

## 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang telah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan juga Laporan Perubahan Ekuitas. Di dalam catatan atas laporan keuangan juga mencakup penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga serta pengungkapan lainnya yang akan diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.



KABUPATEN SAMBILEGI

Dinas Kesehatan

UPTD Puskesmas Sambilegi

Jl. Raya Solo - Yogyakarta, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I

#### PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan:

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan:

### BAB II

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 3. 18 Catatan Atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)

#### 3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

##### 1. Kas dan Setara Kas

No	Uraian	Tahun 2020
	Kas dan Setara Kas	4,064,500,000.00
	Kas di Bendahara APBD	300,000,000.00
	Kas di BLUD	3,764,500,000.00

##### 2. Persediaan

No	Uraian	Tahun 2020
	Persediaan	2,000,000.00
	Barang Pakai Habis	2,000,000.00

Gambar 3. 19 Catatan Atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)

### 3. Aset Tetap

No	Uraian	Tahun 2020
	Tanah	1.200.000.000,00
	Tanah	1.200.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	700.000.000,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	400.000.000,00
	Alat Laboratorium	300.000.000,00
	Gedung dan Bangunan	15.000.000.000,00
	Bangunan Gedung	15.000.000.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(10.000.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(10.000.000,00)

### 4. Hutang Belanja

No	Uraian	Tahun 2020
	Utang Belanja	90.000.000,00
	Utang Belanja Pegawai	40.000.000,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00

### 5. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Tahun 2020
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	200.000,00
	Utang PPN	200.000,00

### 6. Ekuitas

No	Uraian	Tahun 2020
	Ekuitas	20.052.500.000,00
	Ekuitas	20.052.500.000,00

Gambar 3. 20 Catatan Atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)

7. Ekuitas SAL

No	Uraian	Tahun 2020
	Ekuitas SAL	(30.000.000.00)
	Estimasi Perubahan SAL	30.000.000.00
	Surplus/Defisit - LRA	(30.000.000.00)
	Koreksi Ekuitas	(30.000.000.00)

8. Pendapatan Jasa Layanan

No	Uraian	Tahun 2020
	Pendapatan Jasa Layanan Umum - LO	821.500.000.00
	Pendapatan Jasa Layanan Umum - LO	431.000.000.00
	Pendapatan Jasa Layanan BPJS - LO	340.500.000.00
	Pendapatan Jasa Layanan Daerah - LO	50.000.000.00

9. Pendapatan Hasil Kerjasama

No	Uraian	Tahun 2020
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO	85.000.000.00
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO	85.000.000.00

10. Pendapatan Lain-lain BLUD yang sah

No	Uraian	Tahun 2020
	Pendapatan Lain-Lain BLUD yang Sah - LO	200.000.000.00
	Pendapatan Sewa - LO	200.000.000.00

11. Pendapatan APBD

No	Uraian	Tahun 2020
	APBD - LO	350.000.000.00
	APBD - LO	350.000.000.00

Gambar 3. 21 Catatan Atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)

#### 12. Beban Pegawai

No	Uraian	Tahun 2020
	Beban Pegawai	450,450,000.00
	Beban Gaji dan Tunjangan	400,450,000.00
	Beban Pegawai APBD	50,000,000.00

#### 13. Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2020
	Beban Barang dan Jasa	62,000,000.00
	Beban Barang	12,000,000.00
	Beban Jasa	50,000,000.00
	Beban Barang Dan Jasa	62,000,000.00
	Beban Barang	12,000,000.00
	Beban Jasa	50,000,000.00

**3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual**

#### **BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **BAB V PENUTUP**

*Gambar 3. 22 Catatan Atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas X (sumber : Blud.co.id)*

### **3.2.9 Analisis Penerapan PSAP Nomor 013**

Laporan keuangan dari Puskesmas X akan dianalisis kesesuaian unsur-unsur pada setiap laporan keuangan yang tersedia. Unsur-unsur yang terdapat pada laporan keuangan Puskesmas X akan dijabarkan lalu selanjutnya akan dibandingkan dengan unsur-unsur yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Tabel 3.1 Rekapitulasi Analisis Laporan Keuangan Puskesmas X dengan PP  
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
(PSAP 013 TAHUN 2020)**

<b>No</b>	<b>Laporan Keuangan</b>	<b>PSAP 013</b>	<b>Penerapan System Syncore BLUD Pada Laporan Keuangan Puskesmas X</b>	<b>Hasil Analisis beserta Keterangannya</b>
1	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu : a. Pendapatan b. Belanja 1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal c. Surplus/Defisit d. Pembiayaan 1. Penerimaan 2. Pengeluaran e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan terdiri dari beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu: a. Pendapatan b. Belanja 1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal c. Surplus/Defisit d. Pembiayaan 1. Penerimaan 2. Pengeluaran e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Puskesmas X yang disajikan oleh Sistem Syncore BLUD sudah sesuai dengan PSAP Nomor 13.
2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu : a. Saldo Anggaran	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disajikan terdiri dari beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Puskesmas X yang disajikan oleh Sistem Syncore BLUD sudah sesuai

		<p>Lebih (SAL) awal</p> <p>b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)</p> <p>c. SILPA/SIKPA (Selisih Lebih/Kurang) Pembiayaan Anggaran</p> <p>d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</p> <p>e. Lain-lain</p> <p>f. SAL akhir</p>	<p>a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal</p> <p>b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)</p> <p>c. SILPA/SIKPA (Selisih Lebih/Kurang) Pembiayaan Anggaran</p> <p>d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</p> <p>e. Lain-lain</p> <p>f. SAL akhir</p>	<p>dengan PSAP Nomor 13.</p>
3	Neraca	<p>Neraca menyajikan beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu :</p> <p>a. Aset</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aset Lancar</li> <li>2. Aset Tetap</li> <li>3. Piutang Jangka Panjang</li> <li>4. Aset Lainnya</li> </ol> <p>b. Kewajiban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban Jangka Pendek</li> <li>2. Kewajiban Jangka Panjang</li> </ol> <p>d. Ekuitas</p>	<p>Neraca yang disajikan terdiri dari beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu:</p> <p>a. Aset</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aset Lancar</li> <li>2. Aset Tetap</li> <li>3. Aset Lainnya</li> </ol> <p>b. Kewajiban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban Jangka Pendek</li> <li>2. Kewajiban Jangka Panjang</li> </ol> <p>d. Ekuitas</p>	<p>Neraca Puskesmas X belum sesuai, karena pada laporannya terdapat beberapa kekurangan yaitu karena tidak adanya system untuk menginput piutang.</p>

4	Laporan Operasional (LO)	Laporan Operasional (LO) menyajikan beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu: a. Kegiatan Operasional 1. Pendapatan 2. Beban b. Kegiatan Non Operasional c. Pos Luar Biasa d. Surplus/Defisit-LO	Laporan Operasional (LO) yang disajikan terdiri dari beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu: a. Kegiatan Operasional 3. Pendapatan 4. Beban b. Kegiatan Non Operasional c. Pos Luar Biasa d. Surplus /Defisit-LO	Laporan Operasional (LO) Puskesmas X yang disajikan oleh Sistem Syncore BLUD sudah sesuai dengan PSAP Nomor 13.
5	Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas menyajikan tentang informasi dari arus kas masuk dan arus kas keluar, perubahan kas dan juga setara kas dalam satu periode akuntansi, dengan beberapa aktivitas di dalamnya yaitu: a. Aktivitas Operasi 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar b. Aktivitas Investasi 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar c. Aktivitas Pendanaan 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar	Laporan Arus Kas yang disajikan terdiri dari beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu: a. Aktivitas Operasi 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar b. Aktivitas Investasi 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar c. Aktivitas Pendanaan 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar	Laporan Arus Kas dari Puskesmas X sudah sesuai, karena unsur-unsur yang disajikan oleh Sistem Syncore BLUD sudah sesuai dengan PSAP Nomor 13.

		<p>d. Aktivitas Transitoris</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arus Kas Masuk</li> <li>2. Arus Kas Keluar</li> </ol> <p>e. Kenaikan/Penurunan Kas BLU</p> <p>f. Saldo Awal Kas Setara Kas BLU</p> <p>g. Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU</p>	<p>d. Aktivitas Transitoris</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arus Kas Masuk</li> <li>2. Arus Kas Keluar</li> </ol> <p>e. Kenaikan/Penurunan Kas BLU</p> <p>f. Saldo Awal Kas Setara Kas BLU</p> <p>g. Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU</p>	
6	Laporan Perubahan Ekuitas	<p>Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ekuitas awal</li> <li>b. Surplus/Defisit-LO</li> <li>c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</li> <li>1. Koreksi Nilai Persediaan</li> <li>2. Selisih Revaluasi Aset Tetap</li> <li>3. Lain-lain</li> </ol> <p>e. Ekuitas Akhir</p>	<p>Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan terdiri dari beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ekuitas awal</li> <li>b. Surplus/Defisit-LO</li> <li>c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</li> <li>1. Koreksi Nilai Persediaan</li> <li>2. Selisih Revaluasi Aset Tetap</li> <li>3. Lain-lain</li> </ol> <p>e. Ekuitas Akhir</p>	<p>Laporan Perubahan Ekuitas dari Puskesmas X sudah sesuai, karena unsur-unsur yang disajikan oleh Sistem Syncore BLUD sudah sesuai dengan PSAP Nomor 13.</p>

Tabel 3. 2 Analisis PSAP 013

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada Bab III mengenai analisis deskriptif, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa :

1. Puskesmas X merupakan sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang dengan status tersebut memiliki sebuah keistimewaan yaitu berupa fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.
2. Aplikasi Syncore blud yang digunakan oleh Puskesmas X merupakan sebuah software tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat menangani proses dari Pengelolaan Keuangan BLUD dimulai dari untuk Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sampai dengan Pelaporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
3. Pengoperasian dari sistem Syncore BLUD hanya dapat digunakan oleh bagian yang memiliki wewenang dalam penginputan ataupun pelaporan keuangannya.
4. Sebuah sistem aplikasi yang dirancang oleh manusia tentunya juga memiliki kelebihan maupun kekurangan. Adapun kelebihan dari aplikasi Syncore blud yaitu akan secara langsung menghasilkan laporan dari Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Laporan Standar Akuntansi Keuangan yang upgradable karena selalu mengikuti peraturan yang

berlaku serta juga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sedangkan kekurangan dari aplikasi Syncore blud ini yaitu karena berbasis online jadi hanya dapat diakses dengan internet yang stabil dan juga terkadang mengalami *bugs*.

5. PSAP 013 merupakan pernyataan dari Sistem Akuntansi Pemerintah yang di mana digunakan sebagai pedoman bagi BLU/BLUD dalam penyusunan sebuah laporan keuangan.
6. Analisis laporan keuangan pada Puskesmas X menurut PSAP 013 yang diterapkan untuk BLU/BLUD ditemukan adanya kekurangan pada menu yang ada di sistem aplikasi syncore blud yaitu kurangnya bagian piutang.
7. Namun untuk laporan keuangan secara keseluruhan selain pada menu bagian piutang sudah sesuai dengan PSAP 013.

#### **4.2 Saran**

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan atas terlaksananya pelaksanaan magang di PT Syncore Indonesia terhadap Penerapan Aplikasi Syncore Blud dalam penyusunan laporan keuangan yaitu sebagai berikut ini:

1. Untuk menghindari dari adanya gangguan *bugs* dan juga akses yang lambat saat mengakses aplikasi syncore blud maka sebaiknya dilakukan peningkatan dari kualitas jaringan pada klien yang menggunakan aplikasi ini, dikarenakan sistem yang dipakai ini berbasis online maka dukungan dari jaringan yang stabil dan kuat akan sangat berpengaruh pada efektivitas, efisiensi, dan juga kualitas pengelolaan keuangan secara menyeluruh dalam penggunaan aplikasi ini.

2. Agar Puskesmas X dapat lebih cepat memahami aplikasi syncore blud maka sebaiknya diadakan lebih banyak lagi pelatihan dalam penggunaannya, supaya akan lebih banyak lagi pengguna aplikasi yang paham akan pengoperasian aplikasi tersebut.
3. Untuk memantau Puskesmas X dalam mengoperasikan serta mengakses aplikasi tersebut maka sebaiknya dapat diadakan evaluasi antara konsultan dengan klien secara online yang dapat di adakan satu atau dua kali dalam satu minggu supaya konsultan dapat mengetahui sampai di mana pemahaman klien akan aplikasi yang digunakan.
4. Menambahkan sistem menu baru untuk penginputan piutang dengan membuat sistem tambahan “Piutang” supaya dapat memudahkan untuk proses penginputannya.
5. Dengan adanya menu piutang maka akan memudahkan klien dalam penginputan piutangnya pada laporan keuangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- dkk, H. W. (2020). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*. Jakarta: Prenada Media/Kencana.
- Erlina, O. S. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faud, M. R. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fauzi, N. H. (2016). *Akuntansi pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Fauzi, N. H. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: In Media.
- Home Syncore. (n.d.). Retrieved from syncore.co.id: <https://syncore.co.id/id/>
- Ifat, F. (2018). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi.
- Mahmudi. (n.d.). *Pengertian Sistem Pengendalian Intern*. Retrieved from [elibrary.unikom.ac.id](http://elibrary.unikom.ac.id):  
[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3728/8/UNIKOM\\_SULTON%20AULIA\\_13.BAB%20II%20KAJIAN%20PUSTAKA.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3728/8/UNIKOM_SULTON%20AULIA_13.BAB%20II%20KAJIAN%20PUSTAKA.pdf)
- Mahsun, M. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardini, N. Y. (2015). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi 5.1*, 22-32.
- Nomor, P. P. (71). Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Nomor, Permendagri. (79). Tahun 2018. *Badan Layanan Umum Daerah Pemerintahan Kabupaten Sleman (Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sambilegi)*. (n.d.). Retrieved from minio1.123dok.com: [https://minio1.123dok.com/dt03pdf/123dok/pdf/2021/02\\_20/d5a2uu1613838434.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=HBT28R878GBP52A279VA%2F20210718%2F%2Fs3%2Faws4\\_request&X-Amz-Date=20210718T171501Z&X-Amz-S](https://minio1.123dok.com/dt03pdf/123dok/pdf/2021/02_20/d5a2uu1613838434.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=HBT28R878GBP52A279VA%2F20210718%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210718T171501Z&X-Amz-S)

Pemerintahan, K. S. (2020). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Retrieved from ksap.org: <http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2020R1-2.pdf>

*Profile Syncore*. (2018, July 18). Retrieved from blud.co.id: <https://blud.co.id/wp/profil/>

Rahyu, R. (2019, Juni 03). *Penyusunan Laporan Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dispenrindag) Kabupaten Sleman*. Retrieved from dspace.uui.ac.id: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16438>

Syncore. (2018, May 31). *Struktur Badan Layanan Umum Daerah*. Retrieved from blud.co.id: <https://blud.co.id/wp/struktur-badan-layanan-umum-daerah/>

Syncore. (2020, May 11). *simpuskesmas.id*. Retrieved from Rencana Pengembangan Layanan Puskesmas: <https://simpuskesmas.id/wp/>

Syncore. (n.d.). *Profile Syncore*. Retrieved from syncore.co.id: <https://syncore.co.id/id/product/71/Software+BLU+BLUD>

Syncore. (n.d.). *syncore.co.id*. Retrieved from <https://syncore.co.id/id/>

Tasya Rifanis Shofia, S. M. (2020). Analisis Penerapan PSAP No 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada UPTD Puskesmas Gunung Pati Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* , 89-101.

## LAMPIRAN

### Surat Keterangan Magang PT Syncore Indonesia



**SYNCORE INDONESIA**  
Jl. Solo KM 9,7 Yogyakarta 55282  
Telp. 0274 – 488599  
Hp 081 903 900 800  
Website : [www.syncore.co.id](http://www.syncore.co.id)  
Email : [admin@syncore.co.id](mailto:admin@syncore.co.id)

**SURAT KETERANGAN MAGANG**  
**NOMOR 010/SYNC-SKM/VII/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatika Ratna Akhida  
Jabatan : Human Resource Development  
Alamat : Jl. Solo Km. 9,7 Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Elfa Nuriana  
NIM : 18212003  
Asal Universitas : Universitas Islam Indonesia Jurusan Akuntansi

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan magang kerja di PT. Syncore Indonesia selama periode 10 Maret 2021 s/d 10 Mei 2021. Selama magang di PT. Syncore Indonesia, yang bersangkutan sangat antusias dan telah menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Juli 2021

Fatika Ratna Akhida, S.Psi  
**HRD PT. Syncore Indonesia**